

## **Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di wilayah Rawan Konflik**

**Lusi Andriyani<sup>1</sup>, Henni Wijayanti<sup>2</sup>, Mohamad Nasih<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

\*Email: [lusi.andriyani@umj.ac.id](mailto:lusi.andriyani@umj.ac.id)

### **ABSTRAK**

Konflik yang terjadi di masyarakat tidak hanya konflik yang disebabkan faktor sosial dan ekonomi, namun juga faktor politik. Hadirnya pemilihan langsung pada saat Pemilu atau Pilkada saat ini telah memunculkan eksekusi konflik sosial ditingkat horisontal dalam rentang waktu yang lama, bahkan sampai pada pemilu atau pilkada tahun berikutnya. Terkait hal tersebut penting dibangun sinergitas yang kuat antara pemerintah lokal, elit lokal dan komunitas yang ada di masyarakat untuk berperan penting sebagai aktor pencegahan dan penyelesaian konflik. Pemerintah lokal dan elit lokal selama ini melakukan tindakan melalui program pencegahan konflik sebelum perhelatan pemilu atau pilkada dilaksanakan. Kegiatan tersebut seringkali belum menjadi fokus program, baik pemerintah lokal, elit lokal dan komunitas masyarakat. Sehingga kondisi tersebut dapat mengganggu social sustainability khususnya dalam jalinan kehidupan masyarakat yang longgar karena konflik politik. Berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat tersebut, Tujuan Penelitian: untuk mengkaji 1) bagaimana tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menyiapkan pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat. 2) Mengapa konflik karena kegiatan politik seperti Pemilihan umum/Pilkada berlangsung lama di masyarakat. 3) Bagaimana dampak konflik terhadap social sustainability. Tahapan Penelitian: Pengambilan data dilakukan di wilayah Tangerang Selatan sebagai bagian dari Provinsi Banten. Wilayah Banten merupakan wilayah rawan konflik dari 10 wilayah yang menjadi prioritas POLRI pada tahun 2019. Hasil Penelitian; A) Faktor Penyebab Konflik Horisontal; Konflik internal parpol, ketidak siapan untuk kalah, konflik berasal dari kepentingan ormas, hadirnya media, buzzer, lembaga survey yang tidak bertanggungjawab. B) Isu yang berkembang pada proses pemilu: Memilih Figur, pendidikan politik. C) Tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menyiapkan pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat. (1) Tahapan Sebelum Pemilu/Pilkada dilaksanakan: Mengeluarkan surat edaran, Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendidikan Politik, Evaluasi dan Silaturahmi ke masyarakat. (2) Tahapan Pada Pelaksanaan Pemilu/pilkada: Menjaga jarak dengan Pemerintah daerah, Melibatkan Tokoh Agama, Satpol PP dan Ormas: Tidak mengobrol Janji-janji politik. (3) Tahapan paska Pemilu/Pilkada: Konsolidasi dengan tokoh, kunjungan ke tokoh. D) Upaya Mitigasi Konflik: Menyiapkan program pembahasan potensi konflik, memetakan scope/wilayah jangkauan konflik, kerjasama dan sosialisasi politik, Pemetaan model konflik, sumber konflik dan kantong-kantong konflik.

**Kata Kunci** : Sinergitas Pemerintah Lokal, Konflik Horizontal, Wilayah Rawan Konflik, Elit Lokal, Komunitas.

#### **ABSTRACT**

*Conflicts that occur in society are not only conflicts caused by social and economic factors, but also political factors. The presence of direct elections during the current elections or local elections has given rise to excesses of social conflict at the horizontal level for a long time, even up to the following year's elections or regional elections. In this regard, it is important to build strong synergy between local government, local elites and existing communities in society to play an important role as actors in preventing and resolving conflicts. The local government and local elites have so far taken action through conflict prevention programs before holding elections or local elections. These activities are often not the focus of programs, both local government, local elites and communities. So that these conditions can disrupt social sustainability, especially in the loose fabric of community life due to political conflicts. Based on the existing conditions in the community, Research Objectives: to examine 1) how is the level of readiness of the local government and local elites in preparing conflict prevention and resolution in the community. 2) Why do conflicts due to political activities such as General Elections/Pilkada take a long time in society. 3) What is the impact of conflict on social sustainability. Research Stages: Data collection was carried out in the South Tangerang area as part of the Banten Province. The Banten region is a conflict-prone area out of 10 areas that are a priority for POLRI in 2019. Research Results; A) Factors Causing Horizontal Conflicts; Internal conflicts of political parties, unpreparedness to lose, conflicts originating from the interests of mass organizations, the presence of the media, buzzers, irresponsible survey institutions. B) Issues that developed in the election process: Choosing Figures, political education. C) The level of readiness of the local government and local elites in preparing for conflict prevention and resolution in the community. (1) The stages before the Election/Pilkada are carried out: Issuing circulars, Socializing the Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN), Political Education, Evaluation and Gathering to the public. (2) Stages in the Implementation of the General Election/Pilkada: Keeping distance from the regional government, Involving Religious Figures, Satpol PP and Community Organizations: Do not sell out political promises. (3) Post-Election/Pilkada stages: Consolidation with figures, visits to figures. D) Conflict Mitigation Efforts: Preparing a program to discuss potential conflicts, mapping the scope of conflict, cooperation and political socialization, Mapping models of conflict, sources of conflict and pockets of conflict.*

**Keywords :** *Local Government Synergy, Horizontal Conflict, Conflict-Prone Areas, Local Elites, Communities*

## 1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2005-2019 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh (Arifulloh, 2015) (Ramadhan & Masykuri, 2018). Sebagai mekanisme demokrasi yang didesain untuk meminimalisir konflik di masyarakat serta mencegah konflik dalam pemilihan kepemimpinan, sehingga tidak terjadi konflik sosial dan kekerasan. (Siswanto, 2017). Pilkada di Indonesia memiliki logika dasar bekerja dalam demokrasi elektoral yaitu; pertama, pemilu dibangun atas basis pondasi preferensi individu one man, one vote, one voice yang didasarkan atas basis sosial (socially bounded Individu). Kedua, logika “winner take all”, siapa yang menang, maka dia yang akan mendapatkan segalanya”, sementara bagi yang kalah harus menunggu lima tahun lagi. Kondisi ini menciptakan “gerbong” birokrasi atas dasar basis sosial dilingkup pemerintahan daerah. Logika winner take all, menjelaskan tentang adanya dominasi elit. Dalam konteks inilah peran elit sangat dibutuhkan untuk aktif dalam melakukan pencegahan konflik sosial Pilkada.

Konflik yang terjadi sering berujung pada kekerasan dan konflik horizontal (Humaedi, Kudus, Pancasilawan, & Nulhaqim, 2018). Konflik dimulai dari hubungan yang rusak didalam keluarga, tetangga, bermusuhan berdasarkan ras, suku dan agama (Kharisma, 2017). Data menunjukkan Pilkada tahun 2015-2014 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berlangsung selama 1.027 kali yang telah memunculkan konflik 1.323 insiden kekerasan dan 829 bangunan rusak. 648 insiden perusakan berskala kecil [13]. Tahun 2017, terdapat 53 permohonan sengketa hasil pilkada yang diajukan ke MK yang terdiri atas 40 kabupaten, 9 kota, dan 4 provinsi. Pilkada 2018 dengan 171 wilayah pemilihan, terdapat kabupaten/kota paling rawan yang terdapat di wilayah Indonesia Timur; Papua, NTT, Maluku (Andriyani et al., 2021).

Dalam kondisi ini, mekanisme demokrasi yang ada telah menjadi legitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan pandangan pada saat pemilihan pemimpin baru. Konflik ini muncul karena masing-masing pihak sulit mentolerir kepentingan yang bermain. Gambaran design demokrasi yang ada di Indonesia melalui

penyelenggaraan Pilkada dianggap telah gagal sebagai cara mentransformasikan konflik. Potensi konflik horizontal yang ada di masyarakat akibat pilkada. Kondisi ini dapat dikurangi dengan cara Edukasi dan literasi yang cukup kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa pemilu merupakan hal yang biasa untuk memilih pemimpin harapan rakyat dan mencegah masyarakat dari isu hoaks [2]. Pemerintah dan elit lebih menyiapkan cara preventif dalam meminimalisir konflik horisontal. Namun saat ini perkembangan konflik justru terjadi dalam rentang waktu lama sehingga mengganggu kehidupan masyarakat (social sustainability).

Urgensi penelitian ini yaitu sejauh mana langkah pemerintah dan elit untuk mencegah dan mengatasi konflik pasca pilkada di masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup normal tanpa terpecah belah karena pilihan yang berbeda. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menangani konflik horizontal di masyarakat akibat dari kegiatan politik. 2) Faktor penyebab konflik horizontal berlangsung lama di masyarakat. 3) Dampak konflik horizontal akibat kegiatan politik terhadap social sustainability.

### Tinjauan Pustaka:

State of the art dalam kajian ini sinergitas elit, komunitas dalam melihat konflik dan ketahanan sosial sebagai pijakan analisis. Konflik menurut Coser terjadi di antara kelompok dalam masyarakat dapat mempengaruhi hubungan kebiasaan serta melemahkan kreativitas. Benturan nilai dan kepentingan, memunculkan ketegangan antara kelompok antara kepentingan pribadi dan kelompok baru yang menuntut adanya kekuasaan, kekayaan dan status mereka (Coser, 1957). Bagi Kriesberg, konflik sosial memiliki landasan obyektif, yaitu mengejar tujuan yang berlawanan. Lawan mengejar tujuan mereka dengan menghitung biaya dan manfaat dari berbagai strategi. Penilaian mereka dipengaruhi oleh ketakutan, kebencian, stereotip, dan informasi yang salah. Jalannya dan hasil dari konflik lebih ditentukan oleh interaksi lawan yang bertentangan daripada oleh karakteristik internal mereka. Kerangka Kriesberg dibangun berdasarkan pada kasus persuasif dengan menempatkan posisi lawan

dan tingkat organisasinya sebagai variabel penting (Univer-, 2014). Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat mengalami kerentanan akibat konflik. Untuk itu kajian yang terkait dengan Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di wilayah Rawan Konflik menjadi penting. State of the art kajian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. State of The art

Kasus yang menggambarkan pola pencegahan konflik horizontal karena kegiatan politik (pemilu dan pilkada) dapat tergambar pada kegiatan pemilu dan Pilkada tahun lalu. Dari kegiatan Pilkada di Indonesia, telah dilakukan pemetaan konflik Pilkada yang terkait dengan ketidak matangan kebijakan umum Pemerintah. Bentuk aturan main dan kecukupan waktu implementasi yang akhirnya melahirkan kelemahan dalam Pilkada terkait dengan, daftar Pemilih Belum Jelas, Sarana-Prasarana Pengawasan Tidak memadai, Pengiriman Surat Suara Terlambat, Psikologi calon dan pendukung tidak siap, sosialisasi tidak maksimal, KPU belum berpengalaman (Hikmat, 2014). Intimidasi dan ancaman kekerasan yang bersifat SARA juga sering kali terjadi, namun sulit untuk diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang ada. Kampanye berbau SARA yang marak sangat cepat menyebar. Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat lokal dinilai masih lambat dan normatif sehingga tidak mampu mengelola peristiwa-peristiwa yang tendensinya dapat bertentangan dengan prinsip pemilu yang demokratis. Bawaslu juga belum memiliki instrumen pengawasan yang terstandarisasi dan terukur untuk mendeteksi dini politisasi isu SARA dalam pelaksanaan pemilu dan

pilkada yang dapat mengancam prinsip pemilu yang luber dan jurdil (Bawaslu RI, 2017). Untuk itu perlu dibangun sinergitas yang kuat antara Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di wilayah Rawan Konflik.

Meskipun penelitian mengenai konflik telah banyak dilakukan (Nehrun, 2016) (Sembiring & Simanihuruk, 2018) (Mahadhika Putra, 2017) (Fimmastuti, Pramusinto, & Soerjo, 2018), namun masih perlu dilakukan kajian tentang penanganan konflik horizontal akibat kegiatan politik seperti Pilkada untuk menguatkan ketahanan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan nyaman, tidak terbelah karena beda pilihan. Sejak penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2018. Tahun 2015, terdapat 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 di tingkat kota. Tahun 2017, jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada lebih sedikit, yakni 101 daerah, terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 101 kota.1 Sedangkan di tahun 2018, terdapat 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada, yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.2 Total pilkada yang diselenggarakan selama tiga tahun tersebut berjumlah 541 pilkada (Tarmizi, 2018). Sepanjang pelaksanaan Pilkada tersebut telah memunculkan banyak konflik yang berkepanjangan di masyarakat. Karena itu penelitian mengenai sinergitas pemerintah lokal, elit lokal dan komunitas menjadi penting sebagai strategi untuk membangun community resilience. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam penanganan konflik horizontal serta untuk penguatan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Untuk mencapai penelitian unggulan maka telah disusun topik-topik sesuai dengan potensi masing –masing. Topik-topik unggulan yang dapat dipilih oleh peneliti dari semua Program Studi di lingkungan UMJ sehingga semuanya bermuara ke tema besar yaitu Menuju Masyarakat Indonesia yang Berkemajuan dan Berakhlak mulia. Kajian tentang Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di wilayah Rawan Konflik seiring dengan renstra dan roadmap serta topic unggulan yang ditentukan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian bisa saja dilakukan dalam situasi yang wajar melalui pengamatan terhadap orang dan lingkungan hidupnya. Peneliti turun ke lapangan, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mengadakan pengamatan dan penjelajahan. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Rahmat, 2009). Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun. Dalam periode tersebut, peneliti akan menginvestigasi pemangku kepentingan yang ada Tangerang Selatan Provinsi Banten; pemerintah kota, elit lokal, komunitas masyarakat terkait dengan upaya yang dilakukan dalam menangani konflik horisontal. Pemerintah lokal, elit lokal serta komunitas masyarakat yang berpengaruh kami jadikan informan dan sumber informasi untuk kajian sinergitas pemerintah lokal, elit lokal dan komunitas untuk pencegahan konflik dalam mendukung social sustainability. Ketiganya mempunyai peran penting dalam menyelesaikan konflik di tingkat lokal. Pemerintah lokal mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya, terutama mendorong masyarakat untuk mempunyai tingkat resilience yang tinggi untuk menghadapi horisontal. Elit lokal dan komunitas masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk meredam konflik sosial yang berkepanjangan akibat Pemilu atau Pilkada.

Pengambilan data akan dilakukan di wilayah Tangerang Selatan Provinsi Banten dipilih berdasarkan tingkat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sangat tinggi. Indeks ini dikeluarkan oleh Bawaslu RI tahun 2020. Penentuan sampel

menggunakan purposive sampling dengan mengambil 4 pejabat di wilayah kota Tangsel-Banten, KPU dan Bawaslu Tangsel, elit lokal Tangsel, serta 2 informan dari komunitas masyarakat Tangsel.

Sedangkan tehnik pengambilan data dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview)/FGD, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dan FGD akan dilakukan kepada pejabat pemerintah kota untuk mengetahui program apa saja yang di siapkan untuk mencegah konflik horisontal. Wawancara kepada elit lokal untuk mendapatkan informasi peran dan kiprah elit lokal dalam menangani konflik horisontal. Komunitas masyarakat menjadi objek kajian karena mereka mempunyai kelompok yang dapat menginisiasi kegiatan penanganan konflik horisontal. Pengambilan data terhadap pemerintah lokal dan elit lokal serta komunitas akan difokuskan pada wilayah Tangsel-Banten.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang terkait dengan “Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di wilayah Rawan Konflik” .ada beberapa point yang akan dijelaskan dalam pembahasan dengan berdasarkan pada data sekunder dan hasil wawancara tokoh. Point penting antara lain: faktor dan isu penyebab konflik politik saat pelaksanaan pemilu atau pilkada, kesiapan pemerintah dalam mencegah dan menangani konflik pemilu dan pilkada, serta upaya mitigasi konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah Tangerang Selatan.

### A. Faktor Penyebab Konflik Horisontal:

Dalam menjelaskan tentang upaya mencegah konflik horizontal di masyarakat pada saat kegiatan dan aktivitas politik berlangsung terlebih dahulu kita memetakan sebab-sebab konflik yang seringkali muncul dalam kegiatan politik, baik yang bersumber dari internal partai politik maupun yang berasal dari lingkungan serta internal calon yang terkait dengan ketidaksiapan calon dalam

menerima kekalahan. Dengan memetakan penyebab dan sumber konflik kita akan bisa dicari benang merah tahapan-tahapan yang sesuai untuk melakukan pencegahan serta mitigasi konflik politik yang diakibatkan oleh kegiatan Pemilu dan Pilkada di wilayah Tangerang Selatan.

Dari hasil wawancara dan data sekunder yang terkumpul, diperoleh beberapa penyebab konflik di masyarakat, antara lain:

#### 1. Konflik internal parpol

Hampir setiap partai terjadi konflik internal terkait suara, bahkan konflik tersebut diselesaikan sampai pengadilan dengan pelaporan kecurangan suara. Bahwa suara diambil oleh anggota atau calon legislatif nomor yang di atasnya dalam satu partai. Selalu agak sulit dibuktikan dipengadilan tentang suara tersebut, karena mereka hanya memegang catatan dari diri sendiri, sementara KPU diminta untuk membuka kotak suara untuk menghitung kembali jumlah surat suara yang dicoblos. Kondisi tersebut mengakibatkan bukti yang dihadirkan tidak kuat. Solusi terakhir selalu ada di pengadilan. Jalan menyelesaikan konflik melalui pengadilan ditempuh karena musyawarah di internal partai dan KPU tidak mendapatkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan harus ada kesepakatan terlebih dahulu, dimana apabila kalau kalah harus menerima dan kalau menang yang juga diterima. Penyelesaian konflik internal juga dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui musyawarah internal partai karena ada rasa malu apabila konflik tersebut diekspose. Ada yang dimusyawahkan di kelurahan yang terkait saudara dengan saudara karena perbedaan pilihan, peristiwa ini terjadi di Pondok Aren.

#### 2. Ketidak siapan untuk kalah.

Dalam setiap kompetisi, termasuk pelaksanaan pemilu dan pilkada dibutuhkan sikap yang kuat untuk menerima kekalahan dari kompetisi tersebut. Sehingga dengan sikap menerima kekalahan yang bagus, maka akan dapat mengurangi ekses konflik sosial. Hal yang terjadi dilapangan pada saat pelaksanaan Pilkada di Tangerang Selatan, justru menunjukkan fenomena ketidak siapan dari salah satu peserta untuk menerima kekalahan. Di pilkada Tangerang Selatan terdapat tindakan atau perilaku provokasi yang

dilakukan oleh provokator melalui tindakan penurunan spanduk lawan politik/kandidat lainnya. Tindakan tersebut sampai pada tindakan yang mengarah ke pidana, dimana dilakukan dengan mencelakai orang lain. Yang terjadi di Pilkada Tangerang Selatan, ditemukan peristiwa dimana dari salah satu tim peserta Pilkada yang memasang spanduk ditabrak sampai patah pingang. Kejadian tersebut sudah masuk pada kejadian kriminal. Setelah dilakukan penelusuran, diajak komunikasi, dirangkul dan diajak ngobrol ditemukan bahwa tindakan tersebut akibat dari ketidak siapan untuk kalah, terutama ketidak siapan untuk rugi dari modal yang telah mereka keluarkan sebagai biaya politik. Upaya yang ditempuh dengan melakukan silaturahmi mampu mengurangi ekses konflik sosial akibat kegiatan politik. namun dari kegiatan lainnya seperti pileg, kondisi tersebut akan terjadi secara luar. Hal inilah yang menjadikan pendekatan hokum dapat ditempuh.

#### 3. Konflik berasal dari kepentingan ormas

Keterlibatan ormas seperti PP, FBR, forkabi, pppkb, juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Pernah dilakukan pertemuan dengan forkabi atau FBR. Upaya untuk pemberdayaan Ormas dengan membuat koperasi juga dilakukan. Namun ormas tidak menyambut dengan antusias. Ormas cenderung melakukan kegiatan yang sifatnya pragmatis (mengandalkan otot) bukan dengan program-program yang sifatnya pemberdayaan. Upaya untuk mengajak ormas dengan melakukan program pelatihan juga tidak membuahkan hasil, ormas hanya maunya instan. Dengan melihat kondisi tersebut maka Kapolres Ciputat melakukan tindakan tegas atas perilaku ormas sampai pada tindakan memenjarakan apabila ormas sudah melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat umum, terutama terkait dengan lahan parkir. Ormas masih mempunyai kepentingan untuk mencari uang atau keuntungan dari partai politik, calon legislative atau calon kepala daerah yang ikut kompetisi. Kondisi ini akan menjadi masalah besar apabila antara ormas dan pihak yang berkompetisi saling mencari keuntungan. Untuk mencari keuntungan, mereka tidak merasa bersalah dimana kedua belah pihak saling memanfaatkan.

#### 4. Hadirnya media, buzzer, lembaga survey yang tidak bertanggungjawab.

Konflik akibat kegiatan Pemilu, Pileg dan Pilkada juga dipengaruhi media, buzzer, lembaga survey, dan black campaign.

Isu yang berkembang pada proses pemilu:

1. Memilih Figur:

Pemilihan umum, Pileg dan Pilkada adalah persoalan memilih figur bukan partai. Isu yang muncul selalu menyentuh pada aspek pribadi. Hal itu yang memancing emosi massa-massa yang tidak terdidik.

2. Pendidikan Politik:

Pendidikan politik dikeluarkan menjadi isu paling penting. Dimana yang terdidik harus menularkan info kepada mereka yang punya hak pilih. Kegiatan sosialisasi menjadi penting untuk dilakukan di sekolah atau pesantren dengan didampingi tokoh dll.

- B. Tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menyiapkan pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat.

Tangerang Selatan merupakan bagian dari wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari kepolisian terkait dengan konflik yang diakibatkan oleh kegiatan politik. Dalam tahapan pencegahan konflik dan penanganan konflik di masyarakat, terutama konflik yang diakibatkan Karena adanya kegiatan politik. untuk itu perlu di siapkan program yang mendukung adanya pencegahan konflik sosial akibat dari kegiatan politik. Terdapat beberapa program dan tahapan yang dapat dinarasikan dari konflik tersebut:

Tahapan Sebelum Pemilu/Pilkada dilaksanakan:

1. Mengeluarkan surat edaran:

Sebelum pemilu dilaksanakan jauh-jauh hari pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat melalui lurah atau camat untuk tidak melakukan kegiatan yang berbau provokasi. Surat edaran yang dibuat merujuk kepada atauran yang diterbitkan KPU, misalnya berkaitan dengan aturan pemasangan pamphlet, tidak boleh ditempat ibadah dan sekolah. Tatacara menuliskan kalimat-kalimat yang dispanduk tidak boleh menuliskan kalimat yang sifatnya provokasi. Apabila ada spanduk yang menuliskan kalimat-kalimat provokasi, maka sat pol PP akan langsung

menurunkan spanduk tersebut, walau tempatnya benar.

2. Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemerintah daerah menekankan kepada kembali terkait sikap netaralaitas ASN. Dimana ASN harus berlaku netral sesuai aturan. Apabila terdapat ASN yang ikut serta berpolitik maka harus keluar dari ASN. ASN yang melanggar aturan akan diproses dan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan kepada ASN dapat berupa penuruann pangkat, penundaan gaji selama beberapa bulan. Untuk di wilayah Tangerang Selatan belum didapati ASN yang dikeluarkan.

3. Pendidikan Politik:

Pendidikan politik menjadi harl penting dalam menyiapkan masyarakat untuk lebih dewasa dan terbuka menerima kekalahan. Pendidikan politik juga mendorong masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyikapi kondisi yang ada. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan melalui Bakesbangpol melaksanakan program pendidikan politik. Pendidikan politik dilaksanakan sebelum sampai sesudah pemilu berdasar gender dan ormas. Tahun 2022 ini Bakesbangpol Kota Tangerang Selatan telah menyelenggarakan 3 angkatan dengan peserta total 1000 orang lebih.

4. Evaluasi dan Silaturahmi ke masyarakat

Menjelang pemilu dilaksanakan, pemerintah daerah bersama Kapolres dan Kajari serta Dandim melakukan evaluasi dan silaturahmi kepada masyarakat untuk menekankan bahwa kami hadir dimasyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kalau ada yang melakukan provokasi bisa melaporkan langsung.

Tahapan Pada Pelaksanaan Pemilu/pilkada :

1. Menjaga jarak dengan Pemerintah daerah

Pada waktu pelaksanaan pemilu/Pilkada, peserta seyogyanya mengambil posisi agak jauh dan menjaga jarak karena kewenangan ada di KPU dan bawaslu.

2. Melibatkan Tokoh Agama, Satpol PP dan Ormas:

Keterlibatan tokoh agama, ormas dan juga satpol PP dalam mensukseskan kegiatan pemilu dan Pilkada menjadi penting. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Tangerang Selatan adalah dengan mengumpulkan tokoh masyarakat, MUI, FKUB, RW yang berjumlah 735 dalam 2 gelombang untuk dilakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan pemahaman hukum. Pemerintah daerah juga melibatkan Satpol PP untuk menjaga ketertiban, mereka melakukan siap siaga, bersama satuan-satuan di RW dan RT. Kelompok orari juga digandeng untuk berperan aktif mengawasi dan menyiapkan informasi yang terkait dengan kondisi masyarakat. Keterlibatan mereka sangat efektif untuk mencegah konflik. Tangerang Selatan mempunyai jaringan sedemikian rupa, sehingga provoator mengalami kesulitan untuk bisa masuk.

3. Tidak Mengobrol Janji-janji Politik:

Setiap calon sebaiknya melakukan pendekatan kepada orang-orang yang secara materi cukup (pemilik program) dengan menjelaskan program dan track record calon. Dengan menyampaikan track record yang pernah dilakukan, pemilik modal yang berminat membantu kesuksesan pencalonan mendapatkan gambaran sosok pemimpin yang sesuai. Dengan jaminan track record serta kompetensi yang dimiliki oleh calon akan mengurangi adanya janji-janji politik yang akhirnya menjerat calon tersebut apabila mereka memenangkan kompetisi.

Tahapan Paska Pemilu/Pilkada:

Paska pemilu: Konsolidasi dengan tokoh, Kunjungan ke tokoh. Setelah pemilu dalam masa penghitungan, disitu titik rawannya karena ketidakpuasan dari orang-orang yang merasa suaranya di curangi, dari perhitunagna suara terjun satpol PP bersama KPU. Paska pemilu melakukan konsolidasi kunjungan ke tokoh-tokoh. Dalam menangani konflik pasca sangat panjang, mereka tidak siap untuk kalah. Esensinya kembali ke masalah ekonomi. Soslusi bagi yang memnag kita butuh bantuan, maka kita akan bantu. Yang penting sadar dulu. Kalau pileg relatif cair, dan relawan sedikit 2-10 org rata2 mereka keluar uang pribadi, ini mengkhawatirkan terkait modal. Kalau pilkada

bisa 30 lebih. Bisa jadi 1 orang jadi timses lebih dari 2 calon walikota.

Upaya Mitigasi Konflik:

Bagaimana upaya mitigasi konflik pada saat dan setelah pemilu?, pertanyaan ini hadir pada saat konflik masyarakat akibat kegiatan politik (Pemilu dan Pilkada) di Indonesia mencuat. Fragmentasi pilihan masyarakat yang kuat mendorong masyarakat untuk mempertahankan pilihannya dengan cara apapun. Hadirnya dua calon yang berhadapan dalam pemilu (Head to head) menjadikan jarak masyarakat yang mempunyai perbedaan pilihan menjadi semakin kuat. Hal inilah yang membuat upaya pemulihan masyarakat dari konflik politik membutuhkan waktu yang lama. Apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani konflik menjadi kajian yang menarik. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan telah menyiapkan upaya mitigasi konflik politik melalui beberapa tahapan.

1. Menyiapkan Program Pembahasan Potensi Konflik

Selain menyiapkan melalui program-program yang dilaksanakan sebelum pemilu, pada saat pelaksanaan pemilu, serta kegiatan setelah pemilu, pemerintah kota Tangerang Selatan bersama Polres, kejaksaan, KPU membahas potensi-potensi konflik yang kemungkinan muncul pada kegiatan Pilkada dan Pemilu. Kerjasama ini dibangun karena Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak mempunyai alat-alat canggih. Untuk itu keterlibatan kepolisian menjadi hal penting. Pada saat ini wilayah Tangerang Selatan dimonitor oleh pemerintah pusat. Untuk itu perlu sosialisasi massif kepada masyarakat terkait etika dan apa saja yang termasuk dalam pelanggaran serta sumber-sumber konflik. Namun kondisi tersebut juga tidak bisa dihindari, untuk itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan bentrok fisik yang memunculkan konflik horisontal.

2. Memetakan scope/wilayah jangkauan konflik

Upaya mitigasi akan lebih mudah dijangkau pada proses Pilkada. Walaupun konflik terjadi di masyarakat, namun bisa diatasi dengan baik. Konflik dengan jumlah peserta dalam Pilkada yang terbatas, 3 pasang atau 4 pasang akan lebih mudah mitigasinya.

Tim sukses masing-masing calon sudah dapat diketahui dengan pasti dan terukur. Dengan tingkatan wilayah (lokal) memudahkan bagi mereka untuk dikenal oleh masyarakat. Pada Pilkada, figure calon membantu dalam pelaksanaan mitigasi konflik. Pilkada Tangsel Tahun 2019, telah mendorong salah satu calon yang memenangkan Pilkada untuk melakukan pendekatan dengan timses masing-masing calon. Upaya untuk mendatangi timses bertujuan untuk menjelaskan dan menenangkan situasi. Dalam hal ini figure calon kepala daerah wajib melakukan hal tersebut. Tujuannya adalah untuk meredakan kondisi dan menenangkan massa pendukung. Kalau tidak melakukan hal tersebut, maka situasi akan tambah panas.

Upaya mitigasi dalam kegiatan Pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan Pilpres lebih sulit dilaksanakan. Dengan cakupan nasional dan wilayah yang luas, membutuhkan waktu lama dan membutuhkan koordinasi yang panjang. Pilpres dan Pileg cenderung mengerahkan kekuatan massa dalam setiap kampanye sampai kompetisi berakhir. Kegiatan pilpres dan pileg melibatkan massa yang banyak baik massa partai maupun non partai, sehingga lebih sulit dalam melaksanakan program mitigasi. Terdapat beberapa intervensi juga dilakukan untuk meminimalisir konflik horizontal pada pelaksanaan pemilihan anggota legislative. Melakukan penguatan pemahaman di masyarakat, bahwa pemilu, pileg dan pilkada adalah kompetisi. Sifat kompetisi itu ada yang menang dan ada yang kalah. Untuk itu pada peserta harus mempunyai sikap mau menerima kekalahan.

### 3. Kerjasama dan Sosialisasi Politik

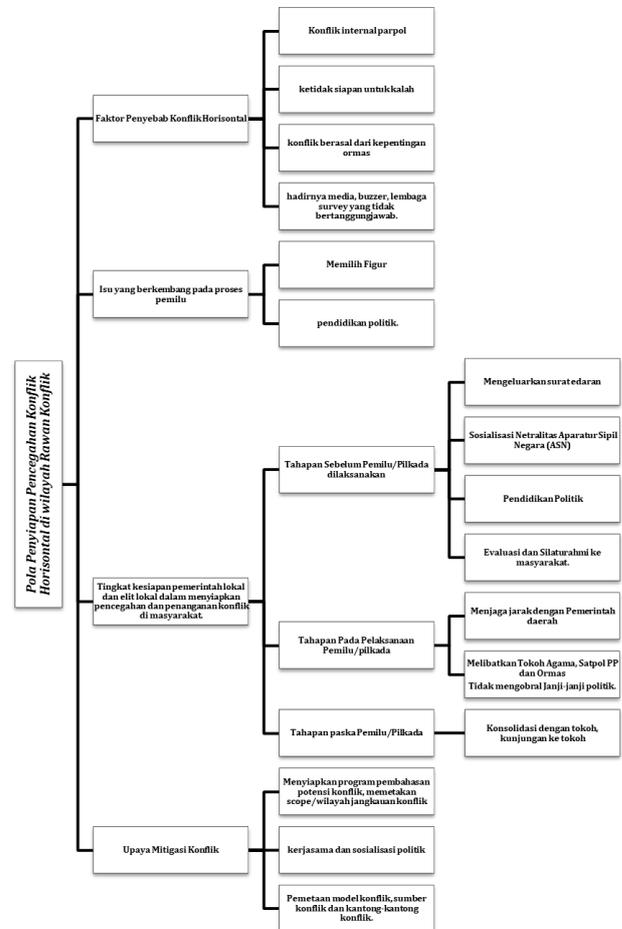
Upaya mitigasi konflik juga dapat dilakukan melalui kerjasama dan sosialisasi politik. dengan demikian, konflik horizontal yang bersumber dari ormas yang dompleng sana sini dan berlindung dibalik timses dan menyebabkan tindakan criminal bisa dihentikan.

### 4. Pemetaan model konflik, sumber konflik dan kantong-kantong konflik

Pemetaan model konflik, sumber konflik dan kantong-kantong konflik di wilayah Kota Tangerang Selatan belum dilaksanakan. Masih menjadi pekerjaan rumah bagi Walikota Tangerang Selatan. Terutama untuk menyukkseskan pemilu 2024. Indikator penting

kesuksesan pemilu 2024 berbeda yaitu tidak ada kerusuhan fisik, namun kalau ada perselisihan dan gugatan disilahkan menyelesaikan dengan baik.

Bagan 1. Pola Penyiapan Pencegahan Konflik Horizontal di wilayah Rawan Konflik



## KESIMPULAN

1. Faktor Penyebab Konflik Horizontal; Konflik internal parpol, ketidak siapan untuk kalah, konflik berasal dari kepentingan ormas, hadirnya media, buzzer, lembaga survey yang tidak bertanggungjawab.
2. Isu yang berkembang pada proses pemilu: Memilih Figur, pendidikan politik.
3. Tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menyiapkan pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat. (1) Tahapan Sebelum Pemilu/Pilkada

dilaksanakan: Mengeluarkan surat edaran, Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendidikan Politik, Evaluasi dan Silaturahmi ke masyarakat. (2) Tahapan Pada Pelaksanaan Pemilu/pilkada: Menjaga jarak dengan Pemerintah daerah, Melibatkan Tokoh Agama, Satpol PP dan Ormas: Tidak mengobrol Janji-janji politik. (3) Tahapan paska Pemilu/Pilkada: Konsolidasi dengan tokoh, kunjungan ke tokoh

4. Upaya Mitigasi Konflik: Menyiapkan program pembahasan potensi konflik, memetakan scope/wilayah jangkauan konflik, kerjasama dan sosialisasi politik, Pemetaan model konflik, sumber konflik dan kantong-kantong konflik.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan fasilitas dan pendanaan dalam penelitian internal melalui Kontrak penelitian internal tahun pelaksanaan 2022 antara Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan peneliti nomor: 324/r-umj/vi/2022 tertanggal 24 juni 2022

#### DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, L., Murod, M., Sulastri, E., Gunanto, D., Sahrul, M., & Andiani, D. (2021). Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 39–64.

Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Pembaharuan Hukum*, 2(2), 301–311. Diambil dari

[jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1376/1060](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1376/1060)

Bawaslu RI. (2017). Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, 1, 82.

Coser, L. A. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. *The British Journal of Sociology*, 8(3), 197.  
<https://doi.org/10.2307/586859>

Fimmastuti, D. R., Pramusinto, A., & Soerjo, D. (2018). Persepsi Dan Tindakan Politik Pemuda Terhadap Gerakan Jogja Independent (JOINT) Dalam Pelaksanaan Pilwalkot Kota Yogyakarta Tahun 2017 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Pemuda (Studi Pada Relawan Jogja Independent (JOINT) di Kota Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(1), 94.  
<https://doi.org/10.22146/jkn.32373>

Hikmat, M. M. (2014). Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam Pilkada Langsung di Indonesia. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*.  
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.437>

Humaedi, S., Kudus, I., Pancasilawan, R., & Nulhaqim, S. A. (2018). Resolusi Konflik Pilkada Di Kota Cimahi Jawa Barat. *Share : Social Work Journal*, 8(1), 101.  
<https://doi.org/10.24198/share.v8i1.16032>

Kharisma, T. (2017). Konflik SARA pada Pilkada DKI Jakarta di Grup WhatsApp dengan Anggota

- Multikultural. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2), 107–120. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.233>
- Mahadhika Putra, F. (2017). Radikalisasi isu agama dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro, 1–10.
- Nehrun, I. (2016). Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 42. <https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.40>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Journal Equilibrium*.
- Ramadhan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 249. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.753>
- Sembiring, R., & Simanihuruk, M. (2018). Politik Dinasti dan Desentralisasi. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.148>
- Siswanto, E. (2017). Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 (Conflict of Elections for District Head of Jember in 2015). *Jurnal Politico*, 17(2), 286–312. Diambil dari <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/POLITICO/article/view/1003>.
- Tarmizi, A. M. H. P. S. T. J. (2018). LAPORAN KINERJA 2018. Jakarta.
- Univer-, Y. (2014). *Social Conflict and Social Movements*. by Anthony Oberschall Review by: Roberta Ash. *social forces*, 52(4), 578–579.